

**MOTIVASI PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH MENJADI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA ASAL RIAU PADA
PEMILIHAN UMUM 2014**

Erwinda

Email : erwindanasyira@gmail.com

Dibimbing Oleh Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km.12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

The research present describe the motivation of nomination legislators to be Regional Representative Council member from Riau Province in 2014 election. In this election, was founding many of the legislators who have the background of political parties prefer to be a Representataive Council member, which are known is independent. Of the 25 candidates DPD registered in KPU, seen 6 names are legislators. They are Desmianto and H. Said Zohrin, S.H., MH which are member of Pekanbaru legislators, then there's that comes from DPRD Riau Province, namely is Iwa Sirwani Bibra, S.Sos., M.Si, H. Zulkarnain, S.H., MH, dan H.Ilyas Labay, S.Sos., M.Si. Further Afri, S.P who are the member of Kuantan Singingi Regency legislator.

The research use the methode are qualitative methodes that analyze problem research by describe the subject and object conditions based on real fact. Researcher collect data from books, government regulation, journal, mass media, website, and deep interview with informan who are knowing about the phenomenon in this research.

The conclusion of this research are motivation of the candidates DPD RI who was from legislators are wanted to defend the aspiration of Riau community. They want to get into state agencies DPD RI because wanted to defend the regional aspiration are still many failure, without intervention from another including from political parties.

Keywords : Motivation, Election, State Agencies

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan sebuah kajian politik yang menganalisa mengenai motivasi pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Provinsi Riau pada pemilihan umum tahun 2014.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diawali dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan dengan tujuan awal motivasi pencalonan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ingin menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Riau pada pemilihan umum 2014. Setelah itu akan

dilanjutkan dengan menganalisa mengenai relasi atau hubungan yang dibentuk oleh para calon anggota DPD RI yang berasal dari anggota DPRD Provinsi Riau dengan partai politik asalnya.

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam kepada informan yang lebih memahami permasalahan yang terjadi dan teknik dokumentasi. Pada metode ini data –data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas merupakan data-data sekunder yang didapatkan dari buku-buku, majalah-majalah, jurnal, surat kabar, penelitian terdahulu yang sejenis dan sumber-sumber lainnya. Peneliti juga menggunakan sarana internet dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan dibahas.

Kerangka teori dibutuhkan peneliti untuk menelaah permasalahan penelitian dengan lebih terperinci. Selain itu, kerangka teori juga berguna bagi peneliti untuk menyimpulkan hasil penelitian. Teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah teori motivasi.

Pelaksanaan pemilu secara langsung memberi gambaran bahwa Indonesia telah melaksanakan proses demokrasi dengan baik, karena diberikannya hak bagi rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri. Pemilihan umum merupakan sarana penyalur aspirasi masyarakat sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan dalam kehidupan negara demokrasi, dimana seluruh warga negara dengan tidak terkecuali ikut berpartisipasi dalam kehidupan pemerintahan. Melalui pemilu setiap warga negara berhak untuk turut serta memilih wakil yang akan duduk di lembaga eksekutif maupun legislatif, maka masyarakat dapat secara langsung memilih

dan menentukan wakil mereka di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui perubahan I, II, III, dan IV pada tahun 1999-2002, sistem ketatanegaraan mengalami perubahan, Indonesia menerapkan sistem bikameral, artinya dibentuk DPD disamping DPR, hal ini dimaksudkan selain DPR diperlukan sebagai pengawas lembaga eksekutif, DPR juga perlu dilakukan pengawasan. Tapi perubahan tersebut, mengakibatkan terjadinya peralihan kekuasaan dari *executive heavy* menjadi *legislative heavy*, karena DPR memegang kekuasaan yang lebih besar dari lembaga eksekutif dan DPR juga memiliki kekuasaan lebih besar daripada lembaga DPD. Bila dibandingkan, DPR adalah lembaga parlemen yang memiliki wewenang lengkap, sementara DPD hanya diposisikan sebagai pendamping tugas konstitusional DPR.

Dengan kewenangan yang begitu terbatas, DPD tidak dapat dikatakan mempunyai fungsi legislasi. Bagaimanapun, fungsi legislasi harus dilihat secara utuh, yaitu dimulai dari proses pengajuan sampai menyetujui sebuah rancangan undang-undang. Ketimpangan fungsi legislasi menjadi semakin nyata dengan adanya Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan DPR.

DPD memiliki posisi yang strategis dan tidak lagi dipandang sebelah mata. Konsekuensi atas hal ini adalah hendaknya terpilih anggota DPD kedepan yang berkualitas, berdedikasi tinggi, serta kuat pemahamannya terhadap daerah yang

diwakili. Pemerintah harus bekerja untuk kepentingan publik sehingga target dan ukuran keberhasilannya adalah terwujudnya kebijakan, pelayanan, serta sarana dan prasarana demi kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan ketenteraman rakyat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Daftar calon terdiri dari 945 nama se-Indonesia untuk memperebutkan 132 kursi, dimana 25 nama diantaranya hanya akan jebol 4 kursi untuk daerah Riau. Ke dua puluh lima calon DPD yang berasal dari Riau diketahui memiliki potensi-potensi yang tidak dapat diragkan lagi. Potensi-potensi tersebut didapat dari pengalaman-pengalaman yang telah dilalui, baik pengalaman organisasi, pengalaman pekerjaan, pengalaman berdasarkan umur, serta pengalaman yang ditempuh melalui jalur pendidikan.

Jika dikaji lebih mendalam, calon DPD RI asal Riau pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 ini baik laki-laki maupun perempuan memiliki latar belakang yang sangat beragam. Ada yang berlatar belakang sebagai pengusaha, wirausaha, wiraswasta, guru, direktur utama perusahaan, pemangku adat Riau, ada juga yang memang sudah pernah terjun ke dunia politik sebelumnya, aktif di partai politik dan juga sedang menjabat anggota DPRD, bahkan ada juga yang menjadi incumbent dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebelumnya. Namun yang sangat menarik pada pemilu legislatif tahun 2014 ini adalah beberapa calon berasal dari jejaring partai politik yang sangat berpengaruh bagi kekuatan calon. Beberapa nama dari daftar calon tetap tercatat masih aktif sebagai politisi partai politik, bahkan tercatat masih sebagai anggota DPRD.

Desmianto adalah politisi senior partai Demokrat dan sekarang masih aktif menjadi ketua DPRD kota Pekanbaru untuk periode yang kedua kalinya. H. Ilyas Labay, S.Sos., M.Si juga tercatat aktif di partai Golongan Karya (Golkar) dan sekarang menjabat sebagai anggota DPRD provinsi Riau yang sebelumnya menjabat sebagai ketua DPRD kota Dumai, begitu juga dengan Afri, S.P tercatat aktif di partai Gerindra dan sekarang menjabat sebagai anggota DPRD kabupaten Kuantan Singingi. Narlis, M.A pernah aktif di partai PKS. Kemudian H. Said Zohrin, S.H., M.H pernah aktif di partai Golkar dan sekarang menjabat sebagai anggota DPRD kota Pekanbaru. H. Zulkarnaen, S.H., M.H aktif di partai PBB dan sekarang menjabat sebagai anggota DPRD provinsi Riau, dan yang terakhir Iwa Sirwani Bibra, S. Sos, M. Si menjabat sebagai anggota DPRD provinsi Riau yang diusung oleh Golkar.

Seperti yang diketahui calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu adalah yang berasal dari *independent* (calon perseorangan), sehingga seseorang yang telah memiliki latar belakang partai politik, secara tidak langsung otomatis keluar dari partai politik yang telah membesarkan namanya itu, semata-mata hanya untuk berkiprah ke DPD. Apakah dikarenakan kurang betahnya mereka pada partai politik yang dinaunginya, atau terdapat faktor lain. Terlihat tidak konsistennya mereka terhadap partai politik yang dimilikinya, sehingga muncul pertanyaan apakah terdapat persaingan yang kuat diantara sesama anggota partai, sehingga mereka tak lagi dianggap di partai tersebut. Selanjutnya apakah yang menjadi motivasi perpindahan anggota DPRD untuk menjadi calon DPD (yang dalam hal ini merupakan calon perseorangan).

Padahal jika dikaji lebih mendalam, nama mereka tersebut dikenal berkat partai politik yang telah dimasukinya, sehingga mereka juga memiliki intensitas yang lebih tinggi di dalam partai politiknya. Intensitas yang tinggi dan kemampuan yang dimiliki bisa saja mengantarkan mereka kepada jenjang yang lebih tinggi, yaitu DPR RI, bukan di DPD RI. Kemudian dengan partai politik, distribusi sosialisasi jangka panjang akan lebih mudah karena adanya mesin politik yang bergerak (dalam hal ini, biasa dilakukan oleh partai politik). Sedangkan di independen berlainan, tidak terdapat lagi mesin politik yang bergerak untuk mendistribusikan sosialisasi politik hanya berjuang sendiri dan beberapa pendukung dengan biaya yang tidak sedikit, sehingga sulit untuk mendongkrak suara tanpa mesin partai yang biasa mendampinginya tersebut. Sehingga sangat menarik untuk mengetahui motivasinya.

Motivasi merupakan akibat dari interaksi seseorang dengan situasi tertentu yang dihadapi. Robbins menyatakan definisi dari motivasi yaitu kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi beberapa kebutuhan individual. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin terpenuhi kebutuhan dalam seseorang dalam organisasi, semakin termotivasilah ia. Robbins mengatakan tiga elemen utama dalam definisi ini adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Motivasi merupakan proses psikologis yang mendasar dan merupakan salah satu faktor penentu dalam mencapai tujuan organisasi. Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual.

Menurut Kemang Ardana, proses timbulnya motivasi seseorang:

- 1) Kebutuhan yang belum terpenuhi;
- 2) Mencari dan memilih cara-cara untuk memuaskan kebutuhan (disini akan terlibat kemampuan, keterampilan, pengalaman);
- 3) Perilaku yang diarahkan pada tujuan;
- 4) Evaluasi prestasi;
- 5) Imbalan atau hukuman;
- 6) Kepuasan;
- 7) Menilai kembali kebutuhan yang belum terpenuhi.

Beberapa motif yang ada pada manusia sebagai faktor pendorong dari perilaku manusia, adalah :

- 1) Motif kekuasaan

Merupakan kebutuhan manusia untuk memanipulasi manusia lain melalui keunggulan-keunggulan yang dimilikinya. David McClelland menyimpulkan bahwa motif kekuasaan dapat bersifat negatif atau positif. Motif kekuasaan yang bersifat negatif berkaitan dengan kekuasaan seseorang. Sedangkan motif kekuasaan yang bersifat positif berkaitan dengan kekuasaan sosial yang dipergunakan untuk berpartisipasi dalam mencapai tujuan kelompok.

- 2) Motif berprestasi

Merupakan keinginan atau kehendak untuk menyelesaikan suatu tugas secara sempurna, atau sukses didalam situasi persaingan. Menurut McClelland setiap orang mempunyai kadar *needs for achievement* yang berlainan.

- 3) Motif untuk bergabung

Menurut Schachter motif untuk bergabung dapat diartikan sebagai kebutuhan untuk berada bersama orang lain. Kesimpulan ini diperoleh oleh Schachter dari studinya yang mempelajari

hubungan antara rasa takut dengan kebutuhan berafiliasi.

4) Motif keamanan

Merupakan kebutuhan untuk melindungi diri dari hambatan atau gangguan yang akan mengancam keberadaannya. Didalam sebuah perusahaan misalnya, salah satu cara untuk menjaga agar para karyawan merasa aman dihari tua kelak, adalah dengan memberikan jaminan hari tua, pesangon, asuransi, dan sebagainya.

5) Motif status

Merupakan kebutuhan manusia untuk mencapai atau menduduki tingkatan tertentu di dalam suatu kelompok, organisasi atau masyarakat.

Maslow mengaitkan teori motivasi dengan teori kebutuhan. Teori *Maslow's Need Hierarchy* dikemukakan oleh A.H. Maslow tahun 1943, teori ini menyatakan bahwa kebutuhan dan kepuasan seseorang itu jamak yaitu kebutuhan biologis dan psikologis berupa material dan nonmaterial. Dalam pandangan Maslow, kita manusia memiliki urutan bawaan atau hirarki, atas apa yang kita inginkan. Kita melewati tahapan kebutuhan, mencapai tahap berikutnya hanya ketika tahap yang lebih dulu telah terpenuhi. Menurut Maslow, ada beberapa macam kebutuhan seseorang yaitu :

1) *Physiological Needs*

Physiological needs (kebutuhan fisik/biologis) yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang, seperti makan, minum, udara, perumahan, dll.

2) *Safety and Security Needs*

Safety and Security Needs (keamanan dan keselamatan) adalah kebutuhan akan keamanan dari ancaman, yakni merasa aman dari ancaman

kecelakaan dan keselamatan dalam melakukan pekerjaan.

3) *Affiliation or Acceptance Needs*

Affiliation or Acceptance Needs adalah kebutuhan sosial, teman, diterima dalam pergaulan kelompok karyawan dan lingkungannya. Karena manusia adalah makhluk sosial, sudah jelas ia menginginkan kebutuhan-kebutuhan sosial.

4) *Esteem or Status or Egoistic Needs*

Esteem or Status or Egoistic Needs adalah kebutuhan akan penghargaan diri, pengakuan serta penghargaan prestise dari karyawan dan masyarakat lingkungannya. Prestise dan status dimanifestasikan oleh banyak hal yang digunakan sebagai simbol status. Misalnya, memakai dasi untuk membedakan seorang pimpinan dengan anak buahnya dan lain-lain.

5) *Self Actualization*

Self Actualization adalah kebutuhan aktualisasi diri dengan menggunakan kecakapan, kemampuan, keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai prestasi kerja yang memuaskan atau luar biasa yang sulit dicapai orang lain. Kebutuhan aktualisasi diri berbeda dengan kebutuhan lain dalam dua hal, yaitu :

- Kebutuhan aktualisasi diri tidak dapat dipengaruhi dari luar. Pemenuhannya hanya berdasarkan keinginan atas usaha individu itu sendiri;
- Aktualisasi diri berhubungan dengan pertumbuhan seorang individu. Kebutuhan ini berlangsung terus menerus terutama jika sejalan dengan meningkatnya jenjang karier seorang individu.

Namun di dalam pembahasan ini hanya digunakan beberapa faktor dari motivasi yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu kebutuhan kekuasaan, kebutuhan berprestasi,

kebutuhan status, kebutuhan keamanan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri.

PEMBAHASAN

Untuk menjadi seorang pemimpin itu, harus mempunyai visi misi yang jelas dengan landasan motivasi yang baik, karena semakin baik motivasi dasar seseorang untuk menjadi pemimpin maka akan memperoleh hasil yang baik pula. Seperti yang dikatakan oleh Jim Rohn, seorang filosofe bisnis di negeri Bill Clinton, dengan tegas mendefinisikan kepemimpinan sebagai *“the ability to inspire yourself, that qualified you, give you the right, that makes you worthy, to lead others”*. Ini berarti tanpa kemampuan untuk membangkitkan motivasi diri yang teguh, tanpa kemampuan untuk memberikan inspirasi kepada diri sendiri lebih dulu, anda tidak akan pernah berhak atau layak menjadi pemimpin. Sebab sama seperti antusiasme, inspirasi dan motivasi itu menular. Dikatakan bahwa orang lebih menilai para pemimpin berdasarkan apa yang dilakukan pemimpin itu daripada apa yang dikatakannya. Namun, apa yang diungkapkan oleh pemimpin itu, entah secara verbal atau melalui tulisanlah, yang akan membuat perbedaan tentang bagaimana mereka akan dinilai.

Seperti yang diketahui calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu adalah yang berasal dari *independent* (calon perseorangan), sehingga seseorang yang telah memiliki latar belakang partai politik, secara tidak langsung otomatis keluar dari partai politik yang telah membesarkan namanya itu, semata-mata hanya untuk berkiprah keranah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sehingga timbul beberapa pertanyaan apakah hal ini dikarenakan kurang betahnya mereka pada partai politik yang dinaunginya, ataukah mungkin

terdapat faktor yang lainnya. Terlihat tidak konsistennya mereka terhadap partai politik yang dinaunginya, mungkin dikarenakan partai tidak memberi ruang kepada mereka untuk maju menjadi wakil rakyat baik di DPRD maupun di DPR RI. Sehingga rasanya menarik untuk mengetahui apa saja yang menjadi motif bagi seorang anggota DPRD ingin menjadi anggota DPD.

Mengenai hal ini, pembahasan dan jawaban akan penulis tetapkan beberapa faktor yang menjadi motivasi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, yaitu berdasarkan teori motivasi McClelland yang dikaitkan dengan teori kebutuhan A.H. Maslow. Salah satu hal yang dapat menimbulkan motivasi seseorang adalah dikarenakan suatu kebutuhan yang belum terpenuhi. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin terpenuhi kebutuhan seseorang maka termotivasilah ia.

Masing-masing orang memiliki jenis kebutuhan, keinginan dan tujuan yang berbeda. Setiap individu tidak sama dalam hal jenis outcome (reward) yang mereka inginkan. Perbedaan-perbedaan ini tidak acak, melainkan dapat diuji secara sistematis oleh suatu pemahaman tentang perbedaan tersebut berdasarkan kekuatan kebutuhan individu.

Untuk memperoleh pengaruh yang kuat dan bertahan lama, motivasi harus bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Mereka yang terlibat dalam meningkatkan motivasi pasti ingin mendapatkan sesuatu dari motivasi tersebut, tetapi bukan hanya efisiensi atau hasil dengan mutu yang lebih baik dan bukan juga merupakan suatu ketaatan kaku yang melaksanakan secara otomatis setiap kebijaksanaan. Para pelaku motivasi menginginkan agar mereka yang sedang

dimotivasi mendapatkan kepuasan nyata dari apa yang mereka perbuat. Suka atau tidak motivasi yang benar-benar efektif tidak hanya memberikan janji-janji atas perasaan dan hasrat dari mereka yang sedang dimotivasi, tetapi haruslah juga memiliki kepedulian nyata pada penerima motivasi sebagai manusia.

1. **Kebutuhan Kekuasaan**

Kekuasaan lebih besar yang memang telah melekat pada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bila dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), apa saja yang ingin diperjuangkan bisa terlaksana karna skopnya sudah di tingkat nasional. Hal ini disampaikan oleh bapak H. Zulkarnaen, S.H., M.H selaku anggota komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi Riau yang menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), berikut wawancaranya :

DPD itu kan sudah bicara nasional, kemaren itu kan dulu sewaktu saya di DPRD skopnya cuma propinsi kan, dan banyak masalah yang saya temukan di daerah kita ini yang pembahasannya itu harus dibahas di tataran yang lebih tinggi, dalam hal ini ya undang-undang. Kalau dibahas berdasarkan Perda, nggak mempan gitu ya. Kalau kita duduk di tingkat pusat itu, kita mempunyai peluang untuk memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah kita ini, makanya harus mengejar dulu dikancah nasional. (Wawancara pada hari Senin tanggal 08 September 2014).

Hal yang sama juga terlihat dari hasil wawancara penulis dengan bapak H. Ilyas Labay, S.Sos, M.Si selaku anggota komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi Riau, ia mengatakan :

Saya dulu sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Golkar kota

Dumai, kemudian dipercaya masuk ke legislatif dua periode di Dumai, dua periode di propinsi ini, saya juga ingin melihat bagaimana perjuangan kita disana, kemudian untuk meminta dukungan penuh dari pusat untuk daerah kita ini, bertahun-tahunnya saya di legislatif, saya sudah mengerti apa saja yang menjadi masalah daerah kita ini dan apa yang harus kita perjuangkan. (Wawancara pada hari Selasa tanggal 02 September 2014).

Kekuasaan yang dimiliki oleh bapak H. Ilyas Labay, S.Sos., M.Si memang terlihat sejak ia menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah partai Golkar. Beliau dipercaya untuk mewakili rakyat di parlemen, selama dua periode di DPRD kota Dumai, kemudian dipercayai lagi untuk duduk di komisi A DPRD propinsi Riau. Hal ini merupakan salah satu dari sekian keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh beliau di dalam pencalonannya ke Dewan Perwakilan Daerah, yang bila dibandingkan dengan calon yang lain yang masih belum terkenal di khalayak ramai. Perjuangan yang panjang, yang dimulai dari bawah, ingin beliau tingkatkan lagi ke ranah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), karna beliau merasa masih banyak permasalahan daerah yang harus dibenahi lagi dan beliau mengerti akan hal itu berdasarkan dari pengalamannya yang ada.

Namun, hal yang berbeda disampaikan oleh pengamat politik Riau M.Zainuddin, S.Ip., MA (ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrah kota Pekanbaru). Menurutnya dengan lamanya H. Ilyas Labay, S.Sos., M.Si itu menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan kekuasaan yang dimilikinya namun merupakan sebuah petunjuk bahwa tidak memungkinkan lagi untuk beliau itu menjabat kembali baik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Hal ini dikarenakan selalu adanya regenerasi partai terhadap anggotanya.

Banyak mereka itu yang dibuang dari partai. Macam Ilyas Labay contohnya dia sebenarnya tidak memungkinkan lagi dicalonkan, karirnya sudah terlalu lama menduduki kursi anggota DPRD, belum lagi di DPRD kota Dumai, kemudian dia di propinsi terlalu lama, jadi perlu adanya regenerasi partai. Oleh karena tidak mungkin dia dicalonkan maka dia mencalonkan diri lewat DPD. (Wawancara pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014).

2. Kebutuhan berprestasi

Motivasi manusia itu berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Kebutuhan untuk mencapai prestasi, ciri-cirinya adalah mengatasi kendala-kendala dan mencapai keberhasilan pada tugas-tugas yang menantang. Di sini calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Riau ingin menuntaskan semua masalah-masalah yang ada di Riau, karena menurutnya masih banyak rencana dan program yang sampai saat ini belum berjalan, seperti penyelesaian masalah konflik lahan yang tak pernah reda di Riau. Sehingga menurutnya itu merupakan motivasinya untuk menjadi anggota DPD-RI dan mengemban tanggung jawab dari masyarakat Riau dan itu merupakan prestasi yang akan mereka raih. Karena bagi para calon anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Riau suatu kegagalan jika nantinya mereka tidak dapat mengemban amanat yang telah diberikan rakyatnya jika mereka terpilih, oleh karena itu para calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersaing untuk menduduki kursi Dewan Perwakilan Daerah tersebut.

Banyak sekali masalah-masalah daerah yang dapat kita temukan di propinsi Riau, contohnya saja di kabupaten Kuantan Singingi masih banyak masyarakat yang saling bentrok dikarenakan masalah lahan. Mereka saling memperebutkan lahan perbatasan yang kononnya milik mereka. Mereka saling mengklaim satu sama lain, padahal itu masalah timbul dikarenakan adanya perusahaan yang membuka lahan perkebunan disana itu. Hah itu salah satu yang menjadi tujuan saya untuk ke DPD tu, saya ingin memperjuangkan hal itu. Saya yakin hal itu akan dapat kita capai jika kita benar-benar memperjuangkannya. Apalagi kita sudah diberikan amanah dari masyarakat kan, sekuat tenaga akan diperjuangkan. (Hasil wawancara penulis dengan Afri, S.P pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2014).

Tujuan dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah ini memang sangat mulia, karna ingin memperjuangkan lahan yang selama ini menjadi penyebab konflik perpecahan diantara masyarakat, padahal konflik tersebut diakibatkan adanya lahan perkebunan dari pihak swasta. Untuk memperjuangkan itu, memang di Dewan Perwakilan Daerah lah tempatnya, hal ini dikuatkan dengan fungsi dari Dewan Perwakilan Daerah itu sendiri yaitu dapat ikut mengajukan dan membahas kebijakan terkait daerah dalam hal tertentu. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

3. Kebutuhan Status

Kebutuhan seorang manusia akan pengakuan terhadap status yang dimilikinya bertujuan agar ia dapat dihormati bila berada di dalam kelompoknya. Contohnya didalam suatu perusahaan, para bawahan seperti karyawan secara otomatis akan menghormati pimpinan atau manager nya dikarenakan status yang melekat pada diri setiap pemimpin. Begitu juga bila kita berada di dalam kelompok, organisasi maupun di dalam masyarakat, status itu menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri manusia. Manusia itu merupakan makhluk hidup yang tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimilikinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Iwa Sirwani Bibra, S.Sos, M.Si., ia mengatakan :

Dikarenakan saya rasa memiliki peluang, jika ada peluang ya kita isi. Saya pikir karna saya sudah duduk di DPRD, jadi posisi DPD juga perlu kita coba. Saya pikir itu hak kita untuk mengisi peluang itu. Lagipun hal itu juga bertujuan kepada perjuangan kepentingan daerah kita ini, apa salahnya saya ingin mencoba ke tingkat nasional, untuk memudahkan saya memperjuangkan kepentingan tersebut. (Wawancara pada Jum'at tanggal 5 September 2014).

Ibu Iwa Sirwani Bibra dalam pencalonannya menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah memang beranjak dari peluang yang dimilikinya. Status yang dimilikinya sebagai anggota DPRD Provinsi Riau sebelumnya membuat beliau ingin mencoba menjadi anggota DPD yang levelnya ke ranah tingkat nasional. Dengan naiknya tingkat status dari level provinsi ke level nasional dapat memudahkan beliau untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Pencalonan menjadi anggota DPD,

memang beranjak dari keinginan untuk menaikkan status dari level yang rendah ke level yang lebih tinggi. Keinginan ini tidak boleh serta merta kita nilai sebagai keinginan orang-orang yang haus akan kekuasaan, tetapi haruslah terlebih dahulu melihat apa yang melatarbelakangi atas keinginan tersebut, setelah kita melihat dasar pemikiran seseorang untuk meningkatkan statusnya dari level yang rendah kepada level yang lebih tinggi, barulah dapat diketahui motif status yang diinginkan bersifat positif atau bersifat negatif.

4. **Kebutuhan Keamanan**

Beranjak dari kekhawatiran akan adanya intervensi dari partai politik yang dinaungi ketika ingin memperjuangkan suatu daerah, para calon anggota DPD lebih memilih untuk mencalonkan diri ke lembaga DPD yang sama-sama kita ketahui merupakan calon independen, yang berdiri sendiri tanpa ada membawa nama orang, golongan, bahkan organisasi. Hal ini tergambar pada hasil wawancara penulis dengan bapak H. Zulkarnaen, S.H., M.H., yaitu :

Kita kan mewakili masyarakat banyak, tidak ada yang bisa mempengaruhi kita, ya kecuali masyarakat itu sendiri. Makanya saya mengambil jalur DPD, jadi lebih independen, lebih mandiri, lebih bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa ada intervensi dari pihak manapun termasuk partai sendiri. Jadi kalau umpama saya dari partai, anggaplah saya jadi DPR, saya pastinya patuh dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga, kemudian tentunya saya patuh dengan pengurus-pengurus partai. Itu nyatanya begitu, memang tidak bisa kita pungkiri. (Wawancara pada hari Senin tanggal 8 September 2014).

5. **Kebutuhan Aktualisasi Diri**

Dalam hal kebutuhan aktualisasi diri ini, penulis mendapatkan jawaban dari para calon anggota DPD yang berasal dari anggota DPRD, mengenai potensi yang dimilikinya untuk mengaktualisasikan keinginannya memperjuangkan kepentingan daerah Riau ini. Berdasarkan hasil wawancara H. Zulkarnain, S.H., MH., menjelaskan bahwa beliau tertarik untuk masuk ke DPD adalah dikarenakan kesadarannya terhadap banyak permasalahan yang dialami daerah Riau ini yang harus diperjuangkan di tingkat pusat. Menurutny, banyak kebijakan dari pusat itu yang belum begitu memihak kepada daerah Riau ini. Pihak pusat memperoleh keuntungan yang besar dari daerah Riau, sedangkan keuntungan tersebut seharusnya disalurkan untuk membangun daerah Riau ini. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Jadi potensi dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Riau tidak dapat menguntungkan bagi masyarakat di daerah Riau itu sendiri. Oleh karena itu beliau ingin masuk ke DPD RI untuk mengapresiasi pandangannya terhadap Riau dan untuk mengaktualisasikan dirinya untuk kepentingan daerah Riau ini.

6. Relasi Antara Partai Politik dan Anggota DPRD yang Menjadi Calon DPD RI Pada Pemilu 2014

Hal ini sebenarnya jika kita lihat berdasarkan teori, tidak ada teori yang berkaitan dengan permasalahan ini. Belum ada ditemui teori yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara partai politik dengan calon DPD yang pernah bergabung ke partai politik tersebut. Tetapi didalam pembahasan ini, penulis mencoba menguraikan relasi tersebut berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan dengan pengamat politik Riau. Dari wawancara tersebut, barulah dapat kita lihat

bagaimana relasi yang dibentuk diantara keduanya.

Menurut pengamat politik Riau, M. Zainuddin, S.IP., MA, yaitu :

Orang mencalonkan ke DPD yang dari partai itu, sebenarnya awalnya begini. Dia ada strategi partai, sama dengan PKS, PKS itu tiap tahun tiap provinsi itu pasti mencalonkan satu kadernya untuk menjadi anggota DPD. Karena anggota dewan pasti satu provinsi kuota pemilihannya sekian, berlomba-lombalah bisa jadi satu partai cuma dapat satu atau dua orang. Ada DPR dan juga DPD, kedua golongan ini saling berhubungan, jadi bisa saja macam mana caranya membuat kebijakan dipusat itu. Apa yang diusulkan oleh partai umpamanya Golkar, apa yang diusung oleh Golkar didukung juga oleh DPD. Makanya mau tidak mau dia harus menitipkan kadernya disitu. Akhirnya kalau di setiap provinsi ada, umpamanya setiap provinsi ada kader Golkar yang naik ke DPD, akhirnya dipusat banyak Golkar jadinya. Walaupun dia tidak membawa bendera Golkar, tetapi kebijakan Golkar itu didukung. Dan itu berhasil oleh partai PKS. Kemudian menyusul pula Golkar, begitu juga partai PBB membuat pak Zulkarnain mencalon, Demokrat juga membuat, Desmianto ya dan lainnya. Jadi motivasinya itu untuk menguasai parlemen ditingkat DPD, supaya ada kadernya yang dipusat yang mendukung program partai, kemudian dikarenakan banyak orang itu dibuang dan tidak memiliki ruang dari partai, dia mungkin sudah kadaluarsa di partai atau perlu adanya regenerasi kader partai. Dan lihatlah rata-rata kader yang dicalonkan itu adalah kader yang potensial bagi partai, contohnya Desmianto itu potensial sudah terkenal di kalangan masyarakat, Zulkarnain juga potensial, dua kali periode naik DPRD provinsi, jadi berangan-angan naik ke pusat dan bisa

menduduki kursi DPD itu. Berbeda dengan Golkar, tradisi partainya memang begitu sejak dulu. Golkar tu tidak mau berkompetisi satu saja. Dia selalu mencalonkan lebih dari satu calon. Jangankan untuk anggota DPD, tingkat calon presiden saja dari Golkar bisa dua, bisa tiga kan, yang seharusnya didukung oleh partai, oleh karena partai tidak mendukung dia, jadinya dia cari yang lain. Periode yang dulu ada pak Ghafar Usman, dia yang didukung oleh partai, naik dia kan. Yang sekarang kita tidak tau siapa yang didukung. Tapi dari sekian banyak utusan dari partai Golkar, yakinlah pasti ada kebijakan partai untuk mendukung salah satunya. (Wawancara pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014).

Dari hasil wawancara di atas, dapat di lihat bahwa adanya kebijakan partai politik yang bertujuan untuk menguasai parlemen. Kebijakan itu berupa pencalonan para kadernya ke lembaga DPD. Kebijakan ini diterapkan hampir di setiap provinsi. Dengan adanya kader partai yang duduk di lembaga DPD, tentunya kader tersebut bisa mendukung segala program-program yang diusulkan oleh partai, karena DPD bisa bekerjasama dengan lembaga DPR didalam penentuan kebijakan, walaupun dia tidak membawa bendera partainya.

Kemudian menurut Bapak M. Zainuddin, S.IP., MA, selaku pengamat politik Riau tersebut, mereka mencalonkan diri ke lembaga DPD, hanyalah dikarenakan mereka tidak diberikan ruang dan kesempatan lagi untuk dicalonkan oleh partai ke DPR RI, maupun di lembaga DPRD. Menurutnya, selalu ada kebijakan partai untuk merekrut calon yang baru atau bisa disebut regenerasi kader partai.

Tetapi hal yang berbeda pula diungkapkan oleh para calon anggota DPD

RI yang memiliki latar belakang politik. Dari hasil wawancara penulis, kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa tidak adanya campur tangan dan dukungan dari partai politik yang dinaungi sebelumnya, mereka benar-benar murni bersifat independen. Mereka sengaja mencalonkan diri ke lembaga DPD, dikarenakan agar terhindar dari adanya intervensi partai politik, ketika memperjuangkan kepentingan daerah. Keinginan mereka untuk menghindari adanya intervensi dari partai politik ketika memperjuangkan aspirasi daerah dikarenakan selalu adanya kontradiksi antara keinginan masyarakat yang diperjuangkan dengan keinginan dari partai politik yang dinaungi.

Kemudian mengenai kesempatan yang diberikan oleh partai politik kepada calon untuk duduk di DPR, dibenarkan oleh para calon. Mereka menyatakan bahwa mereka telah diberi oleh partai untuk dicalonkan ke DPR di pusat maupun di daerah. Kesempatan tersebut diberikan seluas-luasnya oleh partai. Pemilihan mereka lebih kepada lembaga DPD dikarenakan takutnya mereka dari intervensi partai politik yang dinaungi. Tetapi bapak H.Said Zohrin, S.H., MH., secara terang-terangan menyebutkan bahwa dirinya tidak lagi diberi ruang atau kesempatan dari partai politik untuk masuk ke DPR, baik di pusat maupun di daerah. Menurutnya, partai tidak terlebih dahulu menyaring anggota yang benar-benar berpotensi, partai hanya mendahulukan para koleganya atau orang-orang yang dekat dengan pengurus saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka dapat dihasilkan kesimpulan bahwa :

1. Motivasi dijelaskan dari beberapa hal, yaitu kebutuhan kekuasaan, kebutuhan berprestasi, kebutuhan status, kebutuhan keamanan dan kebutuhan aktualisasi diri. Dari kesemua hal tersebut dapat dilihat adanya tujuan yang mulia yang ingin dicapai oleh para calon anggota DPD yang sebelumnya merupakan anggota DPRD. Mereka mencalonkan diri ke lembaga DPD, semata-mata hanya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah yang menurut mereka masih banyak kekurangannya;
2. Ternyata terdapat kebijakan partai yang sengaja mencalonkan para kadernya ke lembaga DPD agar dapat menguasai parlemen di tingkat pusat;
3. Bapak H.Said Zohrin, S.H., MH., tidak diberikan kesempatan oleh partai Golkar untuk dicalonkan ke lembaga DPR, baik dipusat maupun di daerah;
4. Bapak H. Ilyas Labay, S.Sos., M.Si., tidak diberikan ruang lagi di dalam Partai Golkar dikarenakan adanya kebijakan partai yaitu regenerasi kader partai;
5. Ibu Iwa Sirwani Bibra, S.Sos., M.Si., telah diberi ruang oleh Partai Golkar dicalonkan ke DPRD untuk dapil dari Kabupaten Bengkalis, tetapi dikarenakan beliau tidak sanggup makanya mencalonkan ke DPD;
6. Partai politik yang dinaungi (partai PBB) Bapak Zulkarnain, S.H.,

MH., tidak lagi mendapatkan kursi di DPR, baik di pusat maupun di daerah.

7. Bapak Afri, S.P., tidak lagi memiliki partai politik, karena Partai PBR sudah vakum;

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran dalam penelitian ini adalah :

1. Seharusnya partai harus bersikap adil kepada semua anggota kadernya;
2. Seharusnya calon anggota DPD itu benar-benar harus independen tanpa ada intervensi dari partai;
3. Sebaiknya calon anggota DPD memang bertujuan untuk memperjuangkan aspirasi daerah, tanpa ada motif-motif yang lainnya;
4. Partai seharusnya menempatkan para kadernya untuk dicalonkan di daerah yang benar-benar mereka kuasai, dan daerah dimana mereka dikenal oleh masyarakat sekitar;
5. Seharusnya ada kebijakan partai yaitu menilai para kadernya yang potensial untuk dicalonkan ke DPR, baik di pusat maupun di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ardana, Kemang, dkk, 2009, *Perilaku Keorganisasian*, (Yogyakarta : Graha Ilmu).
- Azizi, Qodry, 2007, *“Change Management”*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama).
- Budiarjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama).
- Clegg, Brian, 2000, *“Instant Motivation”*, (Jakarta : Erlangga).

- Darmawan, Ikhsan Darmawan, 2013, *Analisis Sistem Politik Indonesia*, (Bandung : ALFABETA).
- Denny, Richard, 2007, *“Motivate to Win” ed.3*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama).
- Dewi, Ike Janita, 2006, *“Maximum Motivation”*, (Yogyakarta : Santusta).
- Efriza dan Syafuan Rozi, 2010, *Parlemen Indonesia Geliat Volksraad Hingga DPD (Menembus Lorong Waktu Doeloe, Kini, dan Nanti)*, (Bandung : Alfabeta).
- Harefa, Andrias, 2003, *Mematahkan Belenggu Motivasi (membangkitkan energi penggerak Sumber Daya Manusia)*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama).
- Imam Wahjono, Sentot, 2010, *Perilaku Organisasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu).
- Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi (Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia)*, (Jakarta : Rajawali Pers).
- Koeswara, 1995, *Motivasi (teori dan penelitiannya)*, (Bandung : Angkasa), h.230
- Marijan, Kacung, 2010, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, (Jakarta : Kencana).
- Meleong, Lexi J, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya).
- Mitchell, T. R, 1997, *Research in Organizational Behavior*, (Greenwich, CT : JAI Press).
- Raffiudin, Riatty, dkk, 2011, *Teori Politik*, (Jakarta : Universitas Terbuka).
- Rahman, Hasanudin DN, 2004, *Dewan Perwakilan Daerah Bikameral Setengah Hati*, (Yogyakarta : Media Pressindo).
- Sarundajang, 2005, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, (Jakarta : Kata Hasta).
- Smith, Dayle M, *Kiat Memotivasi Orang*, (Jakarta : ARCAN).
- Stephen P, Robbins.; Judge, Timothy A, 2008, *Perilaku Organisasi Buku 1*, (Jakarta : Salemba Empat).
- Stoner, James AF, 1996, *“Management, 6th edition-edisi bahasa Indonesia ©2000, buku 1 dan 2*, (Jakarta : Prenhalindo).
- Subagyo, Joko, 2004, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta).
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R & D*, (Jakarta : Alfabeta).
- Tanri, Abeng, 2006, *Profesi Manajemen*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama).
- Varma, S.P, 2007, *Teori Politik Modern (diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dari buku : Modern Political Theory)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada).
- Wiludjen, Sri SP, 2007, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta : Graha Ilmu).
- Winardi, 2004, *Motivasi dan Pemoivasian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada).

Skripsi dan Makalah

- Idriani, Umi, 2010, *Skripsi (Motivasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perempuan Asal Riau pada Pemilu Legislatif 2009)*. Pekanbaru : Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNRI.
- Susanti, Bivitri, 2007, *“Penguatan Kewenangan DPD dan Pasal-*

Pasal Lain yang Terkait di Bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan, makalah disampaikan dalam Pertemuan Ahli Hukum Tata Negara, diselenggarakan oleh Univ. 45, (Makassar, 30 Juni).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Internet

<http://www.google.com/Teorimotivasi/McClelland>.

http://kpu_riaproprov.go.id